

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973
TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973
TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Bulan: %750 %2022

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen merupakan inisiatif pemerintah dalam hal ini lingkup sektor kelautan dan perikanan. Melalui keputusan DPR RI RUU Landas Kontinen telah ditetapkan di dalam Rapat Paripurna masuk ke dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022.

Pelaksanaan eksplorasi eksploitasi terhadap sumber daya alam, pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan minyak gas bumi serta kabel bawah laut terdapat di dalam UNCLOS 1982 sebagai infrastruktur strategis yang harus dilindungi. Salah satu hal yang menjadi perhatian Anggota Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI Aus Hidayat Nur terkait tentang landas kontinen yakni kewenangan dalam perbatasan landas kontinen.

"Yang menjadi perhatian khusus adalah kewenangan-kewenangan yang saat sekarang ini masih terbagi, sehingga kita memiliki kesulitan untuk mengatasi persoalan perbatasan kita di landas kontinen. ZEE itu sebetulnya zona eksklusif kita, tapi landas kontinen itu lebih luas lagi dari ZEE dan itu yang harus kita tetapkan dengan undang-undang. Untuk target, saya kira pertengahan tahun 2022 bisa selesai," yakin Aus usai mengikuti kunjungan kerja Pansus RUU Landas Kontinen ke Universitas Airlangga, Jawa Timur, Kamis (16/12/2021)

sumber <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36551/t/RUU+Landas+Kontinen+Ditargetkan+Rampung+Tahun+2022>

| JENIS | KETERANGAN | URL |
|---------------------------|---|---|
| Berita | 3 Batas Laut Indonesia: Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) | https://regional.kompas.com/read/2022/08/02/223153978/3-batas-laut-indonesia-laut-teritori-laut-batas-landas-kontinen-dan-zona?page=all |
| Berita | Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM kepada Pemerintah | https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38597/t/Pansus+RUU+Landas+Kontinen+Serahkan+DIM+kepada+Pemerintah |
| Berita | Penyusunan Jawaban Pemerintah terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi RUU tentang Landas Kontinen | https://kkp.go.id/itjen/artikel/41094-penyusunan-jawaban-pemerintah-terhadap-daftar-inventarisasi-masalah-dlm-fraksi-fraksi-ruu-tentang-landas-kontinen |
| Berita | Teguhkan Hak Berdaulat, Pemri Klaim Landas Kontinen 245.000km ² di Selatan Jawa-Nusa Tenggara ke PBB | https://dev.maritim.go.id/teguhkan-hak-berdaulat-pemri-klaim-landas-kontinen-245-000km%C2%B2/ |
| Berita | Teguhkan Hak Berdaulat, Pemri Klaim Landas Kontinen 245.000km ² di Selatan Jawa-Nusa Tenggara ke PBB | https://maritim.go.id/detail/teguhkan-hak-berdaulat-pemri-klaim-landas-kontinen-245000km-di-selatan-jawa-nusa-tenggara-ke-pbb |
| Infografis | Batas Landas Kontinen | https://kkp.go.id/djprl/infografis-detail/9360-batas-landas-kontinen |
| Jurnal | URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG LANDAS KONTINEN INDONESIA | http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10097/5400 |
| Jurnal | Landas Kontinen dan Landas Kontinen Ekstensi | https://jurnalmaritim.com/landas-kontinen-dan-landas-kontinen-ekstensi/ |
| Jurnal | UPAYA HUKUM INDONESIA MENGAJUKAN LANDAS KONTINEN EKSTENSI (ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN) | https://media.neliti.com/media/publications/159075-ID-upaya-hukum-indonesia-mengajukan-landas.pdf |
| Buku | Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional | https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/96/9/Wayan_141097-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
| Dokumen | LAPORAN AKHIR TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LANDAS KONTINEN | https://bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_ttg_landas_kontinen.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA | https://dpr.go.id/jdih/index/index/1580 |
| Undang-undang & Peraturan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA | https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-43-tahun-2008/ |